

PENGEMBANGAN DESA KARANGPELEM KABUPATEN SRAGEN SEBAGAI DESA WISATA

Santy Paulla Dewi, Novia Sari Ristianti, Grandy Loranessa Wungo

Department Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H. Tembalang, Semarang 50275

Email : santy.paulla.dewi@pwk.undip.ac.id

Abstrak

Desa Karangpelem merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian cukup tinggi di Kabupaten Sragen. Namun demikian, potensi ini belum dikembangkan secara maksimal, sehingga dampak aktivitas pertanian ini belum banyak terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kemiskinan masih menjadi masalah yang ditemui di masyarakat. Selain itu adanya tantangan lain seperti dana, ketersediaan infrastruktur, dan kelembagaan juga menjadi penghambat pengembangan desa. Hal ini yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimana berupaya membantu dan memfasilitasi pengembangan desa wisata berbasis pertanian di desa, dimana pemerintah Desa Karangpelem Kabupaten Sragen sebagai mitra. Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah dengan melaksanakan FGD di awal kegiatan untuk menggali isu pengembangan desa, dan di akhir kegiatan untuk mensosialisasikan hasil diskusi dan kajian dilapangan. FGD dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Hasil dari sosialisasi ini adalah konsep pengembangan desa wisata beserta pemetaan peran masing-masing stakeholder.

Kata kunci : pengembangan desa, desa wisata, sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen termasuk sebagai salah satu kabupaten miskin di Provinsi Jawa Tengah (peringkat keempat pada aspek kemiskinan) yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah. Menurut Bappeda Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan kabupaten ini mencapai 13,8% pada tahun 2017, sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 11% dan angka kemiskinan nasional 9% (sragenkab.bps.go.id). Oleh karena itu isu kemiskinan menjadi fokus utama dari pemerintah Kabupaten Sragen. Target pembangunan jangka menengah pemerintah Kabupaten Sragen adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya bisa menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Meski saat ini pemerintah Kabupaten Sragen fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, namun pengembangan ekonomi juga menjadi prioritas. Hal ini termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen salah satu tujuannya adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini, aktivitas ekonomi didominasi oleh bidang pertanian yang juga tercermin dari mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani (34%). Hal ini mencirikan aktivitas di Sragen masih bersifat pedesaan.

Oleh karena itu pengembangan ekonomi Sragen terkait dengan pengembangan aktivitas pedesaan yang dimiliki. Hal ini yang selanjutnya melatarbelakangi perlunya dikembangkan aktivitas-aktivitas vital sebagai generator pengembangan ekonomi kawasan. Salah satu desa yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi adalah Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung. Kecamatan ini merupakan salah satu basis pertanian di Sragen, dan Desa Karangpelem merupakan salah satu desa yang juga memiliki aktivitas ekonomi utama pertanian. Selain itu, desa ini juga memiliki aksesibilitas yang baik dimana dihubungkan dengan Jalan Batujamus-Solo dan Jambangan-Sragen. Desa Karangpelem juga memiliki potensi baik dibidang peternakan, perikanan, dan hortikultura. Pada bidang peternakan yang menjadi unggulan adalah peternakan sapi dan kambing (kambing etawa). Usaha kambing etawa ini dikelola oleh kelompok ternak dengan jumlah hewan ternak mencapai 200-300 ekor. Sedangkan distribusi dari susu kambing etawa ini sudah mencapai daerah Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan pada bidang perikanan lebih berpotensi untuk budidaya ikan air tawar. Komoditas unggulan untuk hortikultura adalah bawang merah, cabe, durian, melon, dan semangka. Selain itu juga terdapat usaha lain (UMKM) seperti pengolahan cabai, kacang oven, mangga kering.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan khususnya pada aspek sosial ekonomi dimana Desa Karangpelem termasuk desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-2 se-Kecamatan Kedawung yaitu sebanyak 328 KK dari 1.402 KK di tahun 2018 (23% dari semua KK termasuk masyarakat

miskin). Kemiskinan ini salah satunya karena minimnya ketrampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian sehingga hanya mengandalkan pada sektor produksi bahan mentah saja. Sistem pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian belum mampu diolah secara mandiri (langsung ke tengkulak). Akibatnya terjadi monopoli dengan harga jual yang rendah. Posisi tawar petani yang rendah dan keinginan adanya kepastian pembelian hasil tani menjadikan pilihan menjual hasil pertanian ke tengkulak menjadi opsi yang paling rasional. Selain karena minimnya ketrampilan dan inovasi dalam mengembangkan hasil pertanian yang juga membuat petani bergantung pada tengkulak. Dengan demikian kesejahteraan petani masih relatif rendah.

Berdasarkan pada gambaran di atas maka, kajian ini menitikberatkan pengembangan Desa Karangpelem dalam konteks *rural regeneration* sehingga mampu menjadi generator ekonomi bagi kawasan sekitarnya. Salah satu aktivitas yang dirasa mampu meningkatkan pendapatan melalui kegiatan wisata (Briedenhann & Wickens, 2004). Jenis wisata yang sesuai dikembangkan di kawasan pedesaan adalah agro wisata yang notabene berbasis pada aktivitas pertanian. Begitu pula halnya dengan wisata yang diusulkan lebih fokus pada potensi lokal Desa Karangpelem yaitu pertanian (agrowisata). Agrowisata merupakan pengembangan wisata di kawasan pedesaan dimana menawarkan berbagai kreasi dan inovasi dari hasil pertanian yang juga dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung. Agrowisata merupakan penerapan konsep yang paling efisien dari pembangunan ekonomi desa menggunakan pemanfaatan sumber daya lokal pada pedesaan dimana tidak hanya melakukan aktivitas utama pertanian seperti bercocok tanam, tetapi juga pengolahan dan juga peternakan (Phillip, Hunter, & Blackstock, 2010). Konsep agrowisata sangat sesuai diterapkan pada kawasan perancangan Desa Karangpelem yang memiliki produk unggulan cabai dan mangga serta program satu rumah satu pohon durian.

Pengembangan Desa Karangpelem ini tentunya perlu memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang dimiliki baik pada aspek sosial, ekonomi, dan fisik sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi pengembangan yang lebih spesifik. Proses identifikasi potensi dan masalah ini perlu melibatkan semua stakeholder yang terkait sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangpelem ini.

2. METODE PENGABDIAN

Pengembangan konsep desa wisata di Desa Karangpelem sebagai desa wisata diawali dengan kajian awal dimana dilakukan *Focus Group Discussion* yang melibatkan stakeholder Kabupaten Sragen seperti Bappeda Litbang, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata, DPU, dan Dinas Perdagangan dan UMKM. Pemilihan stakeholder ini disesuaikan dengan aktor yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan peternakan serta pariwisata. Secara teknis, kegiatan FGD ini diawali dengan paparan dari tim pengabdian mengenai identifikasi awal Desa Karangpelem. Selanjutnya dari paparan awal ini di tanggapi oleh stakeholder yang hadir. Selain itu, Bappeda Litbang juga melakukan paparan baik menyangkut kondisi eksisting maupun kebijakan pengembangan desa-desa di Kabupaten Sragen di tahun mendatang. Dari kegiatan awal ini diketahui beberapa isu yang selama ini dirasakan oleh para stakeholder tersebut pada pengembangan wilayah serta rencana-rencana pengembangan desa baik yang melibatkan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Isu pengembangan desa yang telah diperoleh selanjutnya diverifikasi kepada masyarakat melalui penyebaran kuesioner. Dengan demikian, diperoleh informasi yang berimbang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, juga diketahui preferensi masyarakat dalam pengembangan desa. Kuesioner ini berisi mengenai potensi, masalah, dan tantangan dalam pengembangan desa, preferensi mereka terhadap peran masyarakat dalam pengembangan desa. Teknik sampling yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner ini adalah purposive sampling, dimana menitikberatkan pada masyarakat pelaku usaha pertanian selaku pelaku aktivitas pertanian. Data-data pendukung lain juga diperlukan baik dari instansi pemerintah maupun kajian terdahulu.

Diskusi awal sangat diperlukan agar semua stakeholder memiliki wacana yang sama yaitu mengembangkan desa wisata di Karangpelem; tidak sektoral; dan komprehensif. Sedangkan penggalan persepsi dan preferensi kepada masyarakat diperlukan mengingat karakteristik masyarakat yang cenderung pasif. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan juga mempengaruhi peran dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan desa serta keberhasilan pengembangan desa wisata. Selanjutnya hasil FGD dan kuesioner ini di elaborasi sehingga menghasilkan potensi, masalah, serta

isu dalam pengembangan desa wisata di Karangpelem. Konsep pengembangan desa wisata yang dihasilkan kemudian di sampaikan lagi kepada stakeholder melalui kegiatan FGD yang kedua. Pada kegiatan ini tidak hanya dipaparkan konsep pengembangan tetapi juga masukan serta tanggapan dari para stakeholder. Dengan demikian konsep yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan preferensi dari semua stakeholder dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan terkait (rencana tata ruang).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen No. 74 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sragen Tahun 2019, maka setiap desa di Kabupaten Sragen memperoleh dana desa yang digunakan membiayai kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas ini terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan pengembangan desa wisata termasuk dalam salah satu poin prioritas khususnya pada aspek ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pengembangan desa wisata di Desa Karangpelem yang diusulkan telah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen.

Dalam pengembangan desa, penting kiranya untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada (Sidik, 2015). Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan desa (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier, & Van Es, 2001) yaitu informasi potensi desa (wisata) yang dimiliki, kepemimpinan yang baik, dukungan dan partisipasi dari semua stakeholder terkait, dana, rencana strategis pengembangan desa, koordinasi lintas stakeholder, informasi dan promosi, kelembagaan, dan dukungan masyarakat. Identifikasi potensi dan masalah yang dilakukan disini, ditinjau dari berbagai aspek mulai dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial.

3.1 Potensi Desa Karangpelem

- 1) Secara aspek fisik, memiliki topografi yang relatif datar yaitu 0%-8% serta tidak termasuk lokasi rawan banjir dan longsor sehingga memudahkan dalam kegiatan pembangunan desa wisata.
- 2) Memiliki lahan yang subur untuk pertanian; dominasi jenis tanah litosol yang subur untuk pertanian sehingga memungkinkan intensifikasi lahan pertanian.
- 3) Sistem pengairan dengan irigasi teknis juga merupakan potensi dikarenakan hal tersebut berarti kegiatan pertanian yang berlangsung tidak hanya bergantung pada hujan, namun telah dikelola sedemikian rupa melalui jaringan irigasi dengan sumber air yang berasal dari sungai maupun sumber air lain, sehingga memungkinkan untuk dikelola sepanjang tahun.
- 4) Memiliki berbagai komoditas hortikultura; meliputi komoditas cabai, kacang panjang, pare, terong, semangka, bawang dan melon. Komoditas tersebut ditanam mengikuti pola tanam padi-padi-palawija/hortikultura atau padi-palawija/hortikultura-padi. Komoditas cabai memiliki periode tanam 2-3 kali dalam satu tahun, begitu pula dengan kacang panjang yang menghasilkan sekitar hingga 10 kuintal dalam satu masa panen.
- 5) Terdapat fasilitas pembibitan benih hortikultura dan padi; bibit tanaman seperti padi dan hortikultura biasanya diperoleh petani dengan subsidi pemerintah dan sebagian lain dengan membeli di tempat pembibitan.
- 6) Terdapat tempat produksi pupuk sehingga sangat mendukung kegiatan budidaya pertanian dan hortikultura.
- 7) Terdapat potensi peternakan kambing etawa (susu perah), bebek, dan sapi. Terdapat kelompok ternak yang menaungi kegiatan tersebut dengan beberapa peternak kecil yang termasuk pada kelompok ternak. Kambing etawa dikembangkan sebagai kambing perah yang dimanfaatkan susunya untuk dikonsumsi. Sedangkan bebek yang dikembangkan adalah bebek petelur dan pedaging, serta sapi pedaging.
- 8) Terdapat kelompok tani dan ternak. Keberadaan kelompok-kelompok ini menjadikan para petani dan peternak memiliki wadon untuk mendiskusikan banyak hal; baik pada kegiatan produksi maupun pasca produksi; termasuk pengembangan usaha.
- 9) Akses menuju lokasi cukup strategis yaitu di Jalan Jambangan Grompol (menghubungkan Sragen dan Batujamus, Tawangmangu). Lokasi Desa Karangpelem berada pada Jalan Jambangan-Grompol yang merupakan akses jalan dari Kota Sragen menuju kawasan wisata Tawangmangu dan Kemuning di Karanganyar.

3. 2 Masalah Desa Karangpelem

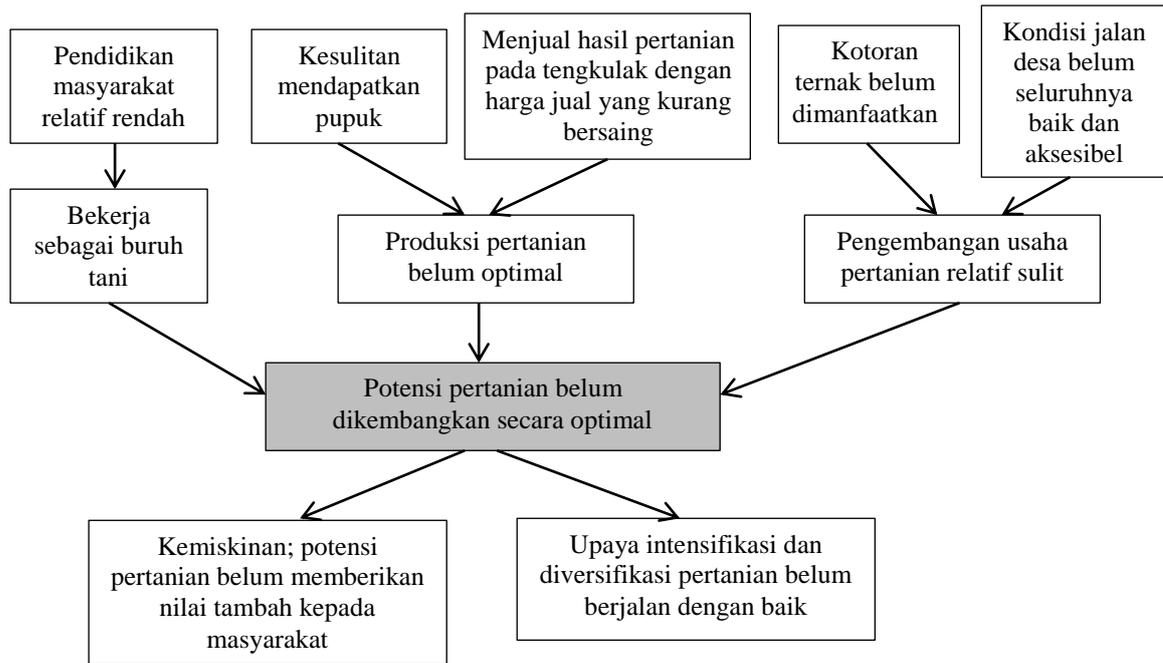
- 1) Kecenderungan penduduk yang masih bergantung pada sektor primer. Penduduk sebagian besar bekerja sebagai petani yang mengolah lahannya sepanjang tahun dengan variasi tanaman yang berbeda agar tetap produktif. Namun tidak adanya kegiatan sampingan yang lain membuat petani cenderung bergantung pada sektor pertanian dan kurang berinovasi. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat kehidupan para petani kurang sejahtera.
- 2) Harga jual hasil produksi yang relatif rendah dikarenakan melalui tengkulak. Petani mengaku bahwa belum terdapat harga yang sesuai dengan harapan mereka dimana untuk produksi padi, petani bahkan pernah mendapat harga Rp.4.000;00 per kg. Sedangkan untuk cabe relatif stabil dengan harga per kg diatas Rp. 10.000;00 dan menurun ketika pada musim-musim tertentu. Harga komoditas kacang panjang dan pare juga relatif rendah yaitu sekitar Rp. 3000;00 hingga Rp. 4.000;00 per kg.
- 3) Status kepemilikan lahan yang belum merata; di dominasi oleh kepemilikan beberapa orang. Masyarakat lokal justru bekerja sebagai buruh pertanian ataupun menyewa lahan untuk keperluan bercocok tanam.
- 4) Masih terdapat beberapa jalan dengan kondisi rusak (berlubang dan bergelombang).
- 5) Belum terdapat tempat pengolahan limbah kotoran ternak. Selama ini penduduk yang beternak seringkali hanya menumpuk kotoran tersebut kemudian membuangnya di tanah yang sudah digali di samping atau belakang rumah.
- 6) Pengelolaan sampah dengan cara tradisional yaitu dibakar; belum ada sistem pengelolaan sampah komunal atau terpadu.
- 7) Belum terdapat ruang publik yang memadai.
- 8) Migrasi keluar penduduk usia muda yang cukup tinggi; mayoritas dilakukan oleh usia produktif yang bermigrasi ke Jakarta dan sekitarnya. Alasan yang diungkapkan beragam mulai dari ketidakediaan lapangan pekerjaan sampai untuk mencari pengalaman.
- 9) Hasil produksi yang belum dikelola secara optimal sehingga tidak terdapat nilai tambah.

3.3 Isu Utama

Setelah diketahui potensi dan masalah di Desa Karangpelem, maka diketahui bahwa kecenderungannya lebih kepada pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata agro dirasa cukup tepat. Hal ini juga diungkapkan oleh Bappeda Litbang dimana pemerintah Kabupaten Sragen juga mendorong pengembangan desa wisata ini untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya diwujudkan dengan adanya bantuan pemberian bibit pohon durian kepada masing-masing KK. Secara lebih lanjut, peruntukan Desa Karangpelem digunakan sebagai kawasan produksi sayur dan produk-produk hultikultura. Selain cabai juga terdapat padi dan beberapa olahan UMKM seperti kripik dan peternakan kambing etawa. Desa Karangpelem juga dapat dimanfaatkan sebagai sentra penghasil buah-buahan khususnya mangga dan durian. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah belum mampunya adanya inovasi untuk pengembangan produk sehingga lebih meningkatkan nilai dari produk tersebut.

Pengelolaan desa yang ada dirasa belum efektif terutama dalam penggunaan dana desa, karena masih didominasi untuk membayar gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat local agar mampu berdaya saing dan menjadikan desa tersebut mandiri relatif kecil. Hal ini juga disadari oleh ketua Pokdarwis, dimana dana yang dialokasikan untuk *capacity building* bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang wisata relatif kecil. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan komunitas local juga harus dilakukan, hal ini untuk menunjang efektifitas dari pengelolaan dan pemberdayaan potensi lokal. Kemitraan ini penting dalam upaya pembiayaan dan inovasi produk sehingga masyarakat dapat berkembang secara terarah dalam hal pengembangan lokal.

Secara aksesibilitas, lokasi Desa Karangpelem berada di kawasan wisata Tawangmangu dan Kemuning di Karanganyar. Aksesibilitas tersebut juga ditunjang dengan adanya pintu tol sehingga memudahkan mobilitas distribusi barang yang merupakan hasil dari produk lokal tersebut khususnya Desa Karangpelem. Namun demikian, ditinjau dari lebar jalan masih terlalu sempit untuk bersimpangan terutama untuk kendaraan-kendaraan pengangkut di beberapa bagian. Hal ini tentu akan menghambat distribusi produk UMKM yang ada. Selain itu prasarana terutama penerangan jalan masih sangat minim sehingga berbahaya bagi pengguna jalan.



Gambar 1. Isu Pengembangan Desa Wisata Karangpelem

3.4 Konsep Pengembangan Desa Karangpelem

Berdasarkan isu yang muncul pada tahap identifikasi potensi dan masalah maka diketahui potensi pertanian dan peternakan belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu konsep pengembangan desa yang dirasa sesuai adalah agrowisata; dimana potensi pertanian dan peternakan dikembangkan melalui aktivitas wisata. Secara lebih spesifik, konsep pengembangan yang di adopsi adalah *rural tourism* dimana dielaborasi dengan konsep keberlanjutan dengan mensinergikan berbagai aspek, antara lain seperti aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kebijakan dan lainnya. Konsep ini dinamakan sebagai *Integrated Rural Tourism*. Dalam *Integrated Rural Tourism* juga diperlukan peran dari berbagai pihak untuk mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi. *Integrated Rural Tourism* juga memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya alam suatu daerah dengan memperhatikan potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Potensi yang dimiliki tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarannya. Berikut adalah kriteria kawasan agrowisata yang dibandingkan dengan kondisi eksisting (Direktorat pengembangan kawasan khusus dan tertinggal Bappenas, 2004).

Tabel 1. Kriteria Kawasan Agrowisata

Kriteria	Kondisi Eksisting
1. Berbasis kawasan di sektor agro	
a. Sub-sistem pertanian primer	Aktivitas utama di Desa Karangpelem adalah pertanian dengan berbagai komoditas seperti hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan.
b. Sub-sistem industri pertanian	Saat ini belum terdapat industri pengolahan, produk hasil pertanian langsung dijual secara mentah oleh masyarakat ke pasar sehingga tidak terdapat penambahan nilai pada produk pertanian tersebut.
c. Sub-sistem pelayanan	Aksesibilitas cukup baik dimana dilalui oleh jalan kolektor yang menghubungkan Kota Sragen dengan Tawangmangu.
2. Kegiatan pertanian dan wisata yang mendominasi kegiatan masyarakat	Kegiatan masyarakat pada umumnya ialah di bidang pertanian dimana 70% lahan adalah lahan pertanian.

Kriteria	Kondisi Eksisting
3. Adanya interaksi yang insentif dan saling mendukung bagi kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan	Dengan pembangunan agrowisata, akan terdapat pengolahan hasil produk pertanian yang akan dipasarkan di kawasan wisata sehingga terjadi peningkatan nilai jual. Selain itu, akan tercipta lahan pertanian yang berkelanjutan sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perekonomian masyarakat dan juga pendapatan daerah sehingga tidak perlu adanya konversi lahan untuk peningkatan nilai jual lahan.

Sumber : Bappenas, 2004

Secara lebih lanjut diuraikan persyaratan kawasan agrowisata.

Tabel 2. Tabel Kriteria Kawasan Agrowisata

Persyaratan Kawasan Agrowisata	Kondisi Eksisting
1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk perancangan komoditi pertanian yang akan dijadikan komoditi unggulan	Lahan pertaniannya cukup luas, dimana 70% ada di kawasan perancangan adalah lahan pertanian
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perancangan sistem dan usaha agrowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan yang cukup bagus dimana jalan sudah beraspal dan tidak berlubang • Aksesibilitas jalan yang mudah karena adanya jalan kolektor yang menghubungkan dengan Kabupaten Karanganyar.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang berkemauan dan berpotensi untuk merancang kawasan agrowisata	Adanya dukungan dari masyarakat untuk membangun agrowisata.
4. Perancangan kawasan agrowisata tersebut mampu mendukung upaya-upaya konservasi alam dan ekosistem secara keseluruhan	Kawasan Agrowisata Karangpelem akan menerapkan konsep perancangan <i>Integrated Rural Tourism</i> sehingga mampu menciptakan kawasan wisata yang berkelanjutan.

Sumber : Bappenas, 2004

Dalam mewujudkan konsep tersebut maka dibutuhkan indikator-indikator yang harus terpenuhi. Berikut merupakan indikator agrowisata yang akan diterapkan.

a. Atraksi

Atraksi yang dimaksud dalam pengembangan agrowisata yaitu lahan pertanian atau perkebunan, keindahan alam, budaya petani atau aktivitas pertanian tersebut. Agrowisata Karangpelem menawarkan beberapa atraksi seperti festival holtikultura berupa hasil pengolahan cabai, mangga, dan tanaman hortikultura lainnya. Terdapat pula *spot* untuk berfoto yang menawarkan pemandangan Gunung Lawu. Selain itu, adanya paket wisata untuk keliling kawasan agrowisata dengan menggunakan sepeda listrik dan mobil wisata.

b. Fasilitas

Dalam menunjang kegiatan agrowisata, diperlukan penambahan fasilitas seperti sarana umum, telekomunikasi, restoran, area wisata *outbond*. Agrowisata Karangpelem menyediakan fasilitas umum berupa ticketing dan informasi wisata, fasilitas peribadatan, perdagangan, tempat atraksi, wisata edukasi, parkir untuk pengunjung, warung makan, dan toko cinderamata bagi pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh khas dari Agrowisata Karangpelem.

c. Infrastruktur

Pengembangan agrowisata memerlukan infrastruktur yang memadai berupa sistem pengairan untuk sawah, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, sumber listrik, jaringan persampahan, sistem pembuangan kotoran, jalan raya, serta sistem keamanan. Agrowisata Karangpelem direncanakan akan memiliki infrastruktur yang memadai dan menunjang agrowisata seperti halnya jaringan telekomunikasi di Agrowisata Karangpelem akan dilengkapi dengan free hotspot untuk penunjang. Secara aksesibilitas Agrowisata Karangpelem juga memiliki akses yang sangat mudah dijangkau dengan dilalui jalan yang menghubungkan dengan Kabupaten Karanganyar.

d. Transportasi

Transportasi yang dimaksud yaitu kemudahan para pengunjung untuk menjangkau agrowisata serta sistem informasi berupa peta objek wisata. Agrowisata Karangpelem telah memenuhi unsur transportasi karena lokasi agrowisata ini dekat dengan Terminal Batujamus. Pada kawasan agrowisata direncanakan terdapat tiga jenis transportasi diantaranya transportasi untuk masyarakat setempat (motorized), transportasi untuk kawasan wisata yang menggunakan mobil pribadi dan Sepeda Listrik, serta transportasi untuk pendukung kegiatan pertanian.

e. Hospitality

Agrowisata yang baik dan berhasil tentunya didukung dengan masyarakat yang ramah dan terbuka. Agrowisata Karangpelem mampu diterima oleh masyarakat sekitar dengan adanya hubungan dua arah antara masyarakat dengan agrowisata, Contohnya adalah dengan adanya industri pengolahan maka hasil pertanian akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Industri pengolahan yang direncanakan berupa keripik mangga, sambal mangga, cabai bubuk, dan sambal brambang.

Setelah mengetahui beberapa indikator yang harus diterapkan dalam pengembangan agrotourism, maka untuk menerapkan wisata yang terintegrasi maka harus tetap memperhatikan indikator dari *Integrated Rural Tourism*. Berikut merupakan terdapat indicator dalam *Integrated Rural Tourism* menurut Clark dan Chabrel (2007) dalam (Barcus, 2013) antara lain

1) *Networking*

Pariwisata yang terintegrasi akan mensinergikan antara kemampuan orang, perusahaan dan agensi di wilayah dan luar wilayah untuk saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Di Desa Karangpelem, konsep *Integrated Rural Tourism* maka akan meningkatkan hubungan antara masyarakat lokal dan juga pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya.

2) *Scale*

Cakupan pariwisata memperhatikan ambang batas yang terkait dengan daya dukung daerahnya. Dalam menerapkan *Integrated Rural Tourism* tetap memperhatikan kapasitas kemampuan daerahnya, seperti kebutuhan ruang untuk pembangunan wisata harus disesuaikan dengan lahan yang ada di kawasan perancangan.

3) *Endogenity*

Pariwisata di suatu wilayah harus dapat diakui sebagai tempat yang mencirikan kawasan tersebut; salah satunya dengan produk pertanian lokal unggulan.

4) *Sustainability*

Pariwisata yang tidak merusak lingkungan, meningkatkan kualitas dan ekologi lingkungan. Dalam pembangunan area wisata tidak akan mengonversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, terutama sawah lestari. Selain itu, Agrowisata Karangpelem juga akan diciptakan *open space* yang bertujuan untuk meningkatkan penghijauan.

5) *Embeddedness*

Pariwisata memiliki peran dalam politik, budaya, dan kehidupan seluruh wilayah dan populasi sebagai prioritas lokal. Agrowisata Karangpelem akan lebih focus terhadap pengembangan pedesaan agar perekonomian masyarakat lokal akan lebih meningkat dan tercipta wisata di Karangpelem yang berkelanjutan.

6) *Complementary*

Pariwisata mampu menyediakan sumber daya dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan. Keberadaan sarana pendidikan, perdagangan dan pembibitan mendukung aktivitas pertanian, sedangkan untuk kegiatan wisata akan disediakan restoran, taman bermain, wisata edukasi dan lainnya.

7) *Empowerment*

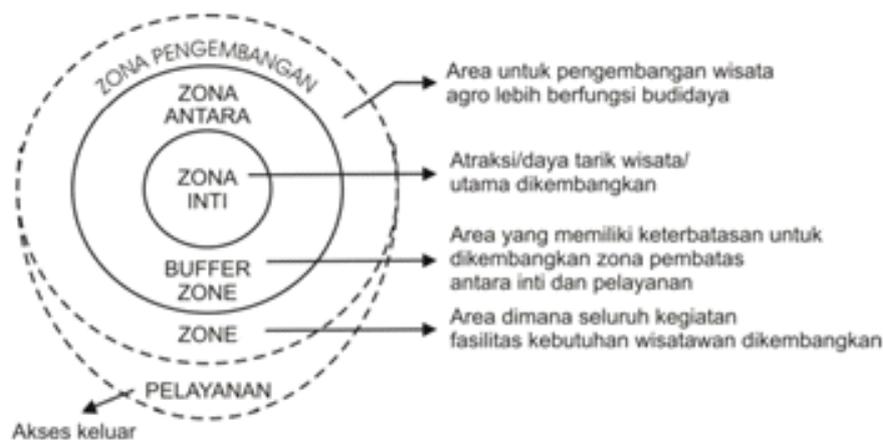
Perlu adanya control politik terhadap industri pariwisata melalui pengecekan kepemilikan, hukum dan perencanaan, dan lainnya. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama untuk mewujudkan keberlangsungan Agrowisata Karangpelem.

Konsep *Integrated Rural Tourism* akan diimplementasikan dengan cara megoptimalkan aktivitas pertanian dan peternakan yang ada. Tanaman hortikultura seperti cabai, mangga, semangka, melon akan dikembangkan baik produksi, kualitas, dan juga nilai jualnya. Peningkatan nilai jual

dilakukan dengan cara adanya industri pengolahan. Contohnya adalah mangga akan diolah menjadi keripik mangga, sambal mangga muda sedangkan untuk cabai akan diolah menjadi bubuk cabai.

Dalam pembangunan Agrowisata Karangpelem, masyarakat akan dilibatkan dalam perumusan kebijakan, menjadi pemandu wisata, dan melakukan produk pengolahan. Hal ini bertujuan agar terciptanya pariwisata yang inklusif, melibatkan semua pihak untuk pembangunan agrowisata. Namun, sebelumnya akan diadakan pelatihan-pelatihan khusus agar masyarakat lokal dapat mengetahui tata cara menjadi pemandu wisata dan mengolah produk yang baik dan benar. Pelatihan pengolahan akan dilakukan seminggu sekali di tiap RT yang ada di kawasan perancangan sehingga nantinya diharapkan tiap RT memiliki satu produk yang menjadi ciri khas RT tersebut.

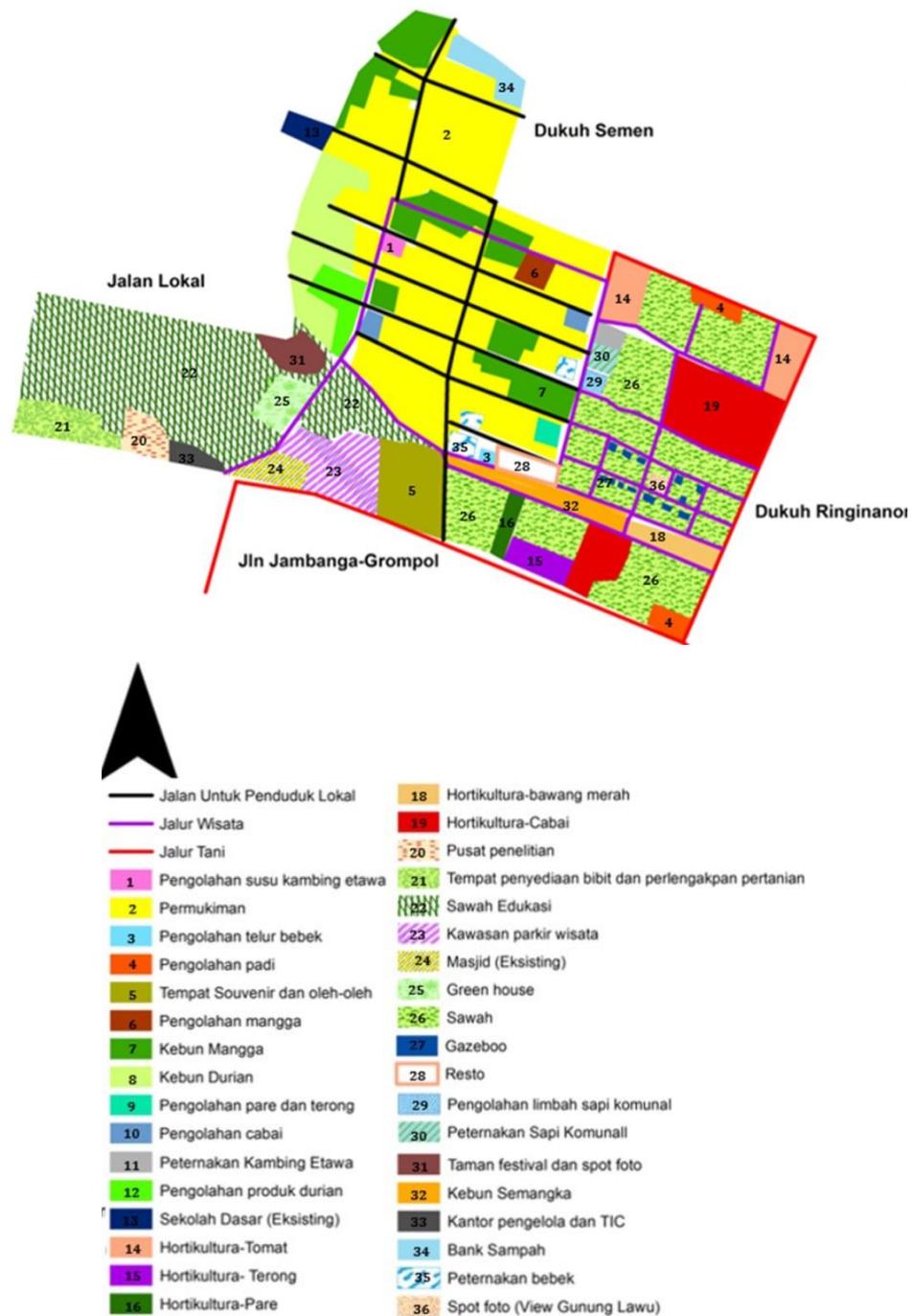
Selain dengan melakukan pengolahan hasil pertanian, dengan adanya agrowisata ini maka akan mengajak masyarakat luar untuk ikut serta dalam mempelajari bagaimana cara menanam, merawat dan mengolah berbagai macam jenis tanaman hortikultura sehingga diharapkan agrowisata ini dapat menjadi kawasan yang edukatif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hasil pertanian. Sehingga kawasan agrowisata ini memiliki fungsi, yaitu kawasan rekreasi dan edukasi. Berikut merupakan zona-zona yang akan diterapkan di Agrowisata Karangpelem



Gambar 2. Zoning Agrowisata

Sumber : Wallace , 1995 dalam (Gunarto, 2009)

- i. Zona inti : Daya tarik wisata di Agrowisata Karangpelem adalah lahan pertanian dan perkebunan, spot foto pemandangan Gunung Lawu, dan restoran di tengah lahan pertanian
- ii. Zona Penyangga: Terdapat zona yang tidak dapat dikembangkan di Agrowisata Karangpelem yaitu lahan pertanian lestari. Hal ini dikarenakan lahan pertanian lestari merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- iii. Zona Pelayanan : Zona dimana area permukiman warga dan ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan masyarakat. Pada area ini akan terdapat fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan baik oleh masyarakat setempat maupun pengunjung seperti fasilitas peribadatan, rumah makan, serta hasil pengolahan produk pertanian.
- iv. Zona pengembangan : Adanya kawasan penelitian dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap sawah sehingga di kawasan perancangan akan diadakan sawah edukasi yang dapat memberikan pengetahuan mengetahui cara tanam dan panen padi.



Gambar 3. Penerapan Konsep Desa Wisata Karangpelem

Stakeholder yang terkait dalam pengembangan desa wisata Karangpelem juga telah diidentifikasi dan dipetakan perannya masing-masing.

Tabel 3. Stakeholder dalam Pengembangan Desa Karangpelem

No	Stakeholder	Keterkaitan
1	Bappeda Litbang	Koordinasi dan kebijakan pengembangan desa
2	Dinas PU dan Penataan Ruang	Kesesuaian dengan kebijakan tata ruang
3	Dinas Pertanian	Pengembangan usaha pertanian
4	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan pengembangan wisata sesuai dengan kapasitas lingkungan
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	Penyediaan fasilitas permukiman
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pengembangan usaha peternakan
7	Dinas Koperasi dan UMKM	Pengembangan aktivitas penunjang wisata

8	Dinas Pemuda, OR, dan Wisata	Pengembangan aktivitas wisata
9	Pemerintah Kecamatan Kedawung	Stakeholder inti
10	Pemerintah Desa Karangpelem	Stakeholder inti
11	BUMDes	Pembiayaan dan kegiatan teknis
12	Pokdarwis	Fasilitator kegiatan
13	Kelompok Tani	Pelaku kegiatan utama
14	Kelompok Ternak	Pelaku kegiatan utama

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi pengembangan desa wisata Karangpelem menghasilkan arahan pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata sekaligus juga pemetaan stakeholder yang terkait. Potensi pertanian yang cukup besar belum memberikan dampak terhadap masyarakat dan masih berjalan secara incremental sehingga tidak ada nilai tambah terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian mendasari usulan pengembangan desa wisata khususnya agro wisata di Desa Karangpelem. Harapannya dengan mengembangkan agrowisata dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Berdasarkan hasil FGD dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat diketahui bahwa pada prinsipnya semua stakeholder mendukung usulan pengembangan tersebut. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti penyediaan dan perbaikan beberapa infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi pertanian, distribusi, maupun aksesibilitas terkait dengan wisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari Pengabdian Masyarakat Batch I 2019 yang didanai oleh Fakultas Teknik Undip. Seluruh kegiatan baik dari FGD 1 dan 2, penyebaran kuesioner, dan juga observasi mendapatkan bantuan sepenuhnya dari Kelompok Studio Sragen A 1.2 (Athuf Hazimah, Titin Andini, Felicia Putri, Zukruf Novandaya, Falian A, Tiyas Maulia, Tiara Ika F, Rifqi A, Aldhea Putri).

DAFTAR PUSTAKA

- Barcus, H. (2013). Sustainable Development or Integrated Rural Tourism? Considering the Overlap in Rural Development Strategies. *Journal of Rural and Community Development*, 8(3), 127–143.
- Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas-vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*, 25(1), 71–79. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(03\)00063-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3)
- Direktorat pengembangan kawasan khusus dan tertinggal Bappenas. (2004). Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. In *Bappenas* (Vol. 3).
- Gunarto, A. (2009). *Melalui Pengembangan Agrowisata Perikanan Di Danau Singkarak Sumatera Barat*. 5(2), 145–156.
- Peraturan Bupati Sragen No. 74 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sragen Tahun 2019.
- Phillip, S., Hunter, C., & Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. *Tourism Management*, 31(6), 754–758. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.001>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J., & Van Es, J. C. (2001). Factors for success in rural tourism development. *Journal of Travel Research*, 40(2), 132–138. <https://doi.org/10.1177/004728750104000203>